ANTHOR
Education and Learning Journal
https://anthor.org/index.php/anthor
Email. anthor.Jurnal@gmail.com
E-ISSN: 2963 –198X P-ISSN: 2963–2498 | Halaman: 1965 - 1974 | Volume 5 Nomor 5 Tahun 2026

Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Antarprovinsi di Indonesia: Pengukuran Multidimensi dan Analisis Determinan Berbasis Data Panel Tahun 2015–2025

Informasi Naskah

Neng Rika Priliyani[1]
R. Djoko Andreas Navalino[2]
Yanda Dwira Firman Z[3]

Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

neng.priliyani@mp.idu.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan, sebagaimana terlihat dari perbedaan capaian pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran antarprovinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi, membandingkan capaian antarprovinsi, serta menganalisis determinannya selama periode 2015–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data panel tidak seimbang dari Badan Pusat Statistik yang mencakup 38 provinsi. Inklusivitas diukur melalui tiga dimensi elastisitas, yaitu inklusivitas kemiskinan (IG^{p}), ketimpangan (IG^{in}), dan ketenagakerjaan (IG^{em}), yang dinormalisasi dan digabungkan menjadi Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI). Pengukuran menggunakan 343 observasi provinsi-tahun, sedangkan analisis determinan menggunakan regresi data panel dengan 274 observasi dari 37 provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata IG^{p} sebesar 0,69, IG^{in} sebesar 0,27, dan IG^{em} sebesar 0,42, dengan rata-rata IGI mencapai 0,53. Pertumbuhan ekonomi disertai penurunan kemiskinan pada 84,3% observasi, ketimpangan pada 68,5%, dan pengangguran pada 72,3%, tetapi perbaikan ketiganya secara simultan hanya mencapai 43,1%. Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh memiliki IGI tertinggi, sedangkan Papua dan Maluku Utara terendah. Inflasi berasosiasi positif dan signifikan dengan IGI, pendidikan signifikan hanya pada model *fixed effects*, sedangkan PDRB per kapita dan komponen kuadratnya tidak signifikan secara bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif sehingga diperlukan kebijakan yang memperkuat pemerataan manfaat pembangunan dan penciptaan kesempatan kerja.

Kata Kunci:
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Disparitas Antarprovinsi, Indeks Komposit, Determinan Inklusivitas, Regresi Data Panel.

Abstract

High economic growth does not necessarily ensure an equitable distribution of welfare, as reflected in interprovincial disparities in poverty, inequality, and unemployment reduction in Indonesia. This study aims to measure the inclusiveness of economic growth, compare provincial performance, and examine its determinants during 2015–2025. A quantitative associative approach is employed using an unbalanced panel dataset covering 38 Indonesian provinces, obtained from Statistics Indonesia. Inclusiveness is measured through three elasticity-based dimensions: poverty inclusiveness (IG^{p}), inequality inclusiveness (IG^{in}), and employment inclusiveness (IG^{em}). These dimensions are normalized and combined into a composite Inclusive Growth Index (IGI). The measurement uses 343 province-year observations, while the determinant analysis employs panel regression with 274 observations from 37 provinces. The results indicate average values of 0.69 for IG^{p}, 0.27 for IG^{in}, 0.42 for IG^{em}, and 0.53 for IGI. Economic growth is accompanied by poverty reduction in 84.3% of observations, inequality reduction in 68.5%, and unemployment reduction in 72.3%, while simultaneous improvements across all three dimensions occur in only 43.1%. Riau, West Nusa Tenggara, and Aceh record the highest IGI scores, whereas Papua and North Maluku rank lowest. Inflation shows a positive and statistically significant association with IGI, education is significant only in the fixed-effects model, and per capita regional GDP and its squared term are not jointly significant. These findings indicate that economic growth remains insufficiently inclusive, highlighting the need for policies promoting equitable development benefits and employment opportunities.

Keyword:
Inclusive Economic Growth, Interprovincial Disparities, Composite Index, Determinants of Inclusiveness, Panel Data Regression.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike* 4.0 *International* (CC BY-SA 4.0)

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

PENDAHULUAN

Peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia tidak serta-merta menunjukkan bahwa kesejahteraan telah dinikmati secara merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi, tetapi tidak menjelaskan distribusi manfaatnya. Menurut Kuznets (1955), ketimpangan berpotensi meningkat pada fase awal pembangunan sebelum menurun pada tahap berikutnya. Todaro dan Smith (2015) juga memandang pertumbuhan sebagai prasyarat penting pembangunan, namun belum memadai untuk menjamin pengurangan kemiskinan, penyempitan kesenjangan, dan perluasan kesempatan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan pertumbuhan agregat itulah yang melahirkan konsep pertumbuhan ekonomi inklusif. Ianchovichina dan Lundstrom (2009) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan yang cepat, berkelanjutan, dan melibatkan sebagian besar angkatan kerja sebagai kontributor sekaligus penerima manfaat. Klasen (2010) menambahkan bahwa inklusivitas perlu dinilai dari hasil (kemiskinan, ketimpangan, pengangguran) dan dari proses, yaitu akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pasar kerja. Gagasan ini sejalan dengan pendekatan kapabilitas Sen (1999), yang mengukur pembangunan dari perluasan kebebasan dan kapasitas individu, bukan dari akumulasi pendapatan agregat.

Data statistik menunjukkan bahwa perbaikan indikator perekonomian nasional masih berjalan bersama kesenjangan distribusinya. Pada September 2025, kemiskinan tercatat 8,25 persen atau 23,36 juta orang (BPS, 2026a), sedangkan Gini Ratio nasional sebesar 0,363. Nilai ketimpangan antardaerah bervariasi dari 0,214 di Kepulauan Bangka Belitung hingga 0,426 di Papua Selatan. Ketimpangan perkotaan (0,383) juga melampaui perdesaan (0,295) (BPS, 2026b). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hasil pertumbuhan belum dinikmati secara merata. Bappenas (2023) merespons isu ini melalui Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mencakup pilar pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.

Urgensi analisis wilayah semakin meningkat setelah terbentuknya empat provinsi baru di Papua. Melalui Undang-Undang Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2022, pemerintah membentuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, disusul Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022. Dengan demikian, jumlah provinsi bertambah dari 34 menjadi 38 (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022). Pemekaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah yang menghadapi ketertinggalan historis.

Studi terdahulu memberikan fondasi penting tapi masih menyisakan sejumlah ruang penelitian. Pertama, analisis Sitorus dan Arsani (2018), Kusumaningrum dan Yuhan (2019), serta Afriliana dan Wahyudi (2022) terbatas pada 33 atau 34 provinsi sehingga belum mencakup empat provinsi hasil pemekaran di Papua. Kedua, penelitian determinan yang lebih mutakhir, seperti Lukiawan et al. (2026), menitikberatkan satu wilayah, yaitu Jawa Tengah, dan belum menyediakan perbandingan lintas provinsi. Ketiga, studi pengukuran dan studi faktor penentu inklusivitas kerap dipisahkan, padahal keduanya perlu dihubungkan agar variasi hasil antardaerah dapat dijelaskan secara konsisten (Rini & Tambunan, 2021).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengukur inklusivitas pertumbuhan di 38 provinsi, (2) menganalisis tingkat inklusivitas setiap provinsi, dan (3) menelaah faktor-faktor yang berkaitan dengan kesenjangan inklusivitas antar provinsi. Nilai tambah penelitian terletak pada penggunaan panel tidak seimbang yang mencakup seluruh 38 provinsi, penyusunan indikator tiga dimensi berbasis data BPS yang dapat direplikasi, serta pengujian determinan untuk rentang tahun 2015–2025.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pendekatan Harrod (1939) dan Domar (1946), pertumbuhan ditentukan oleh tabungan serta investasi dengan rasio modal terhadap output yang tetap. Solow (1956) dan Swan (1956) kemudian memasukkan hasil marjinal yang menurun serta kemajuan teknologi eksogen (Mankiw et al., 1992). Berbeda dari keduanya, teori pertumbuhan endogen memandang inovasi, modal manusia, dan pembelajaran melalui praktik sebagai sumber kemajuan teknologi (Romer, 1986; Lucas, 1988; Aghion & Howitt, 1998). Walaupun menjelaskan dinamika kenaikan output, pendekatan-pendekatan tersebut belum secara langsung menerangkan distribusi hasil pertumbuhan. Oleh karena itu, investasi dan pendidikan relevan dipertimbangkan sebagai faktor yang berhubungan dengan inklusivitas.

Hipotesis Kuznets dan Okun's Law

Hipotesis Kuznets (1955) menggambarkan lintasan ketimpangan berbentuk U terbalik: kesenjangan cenderung melebar pada tahap awal peralihan pekerja dari pertanian berproduktivitas rendah menuju industri berupah lebih tinggi, kemudian menyempit seiring peningkatan pendapatan. Akan tetapi, temuan lintas negara tidak selalu mendukung pola tersebut, dan ketimpangan sendiri dapat menghambat pertumbuhan (Persson & Tabellini, 1994; Perotti, 1996). Dalam studi ini, gagasan Kuznets mendasari dimensi ketimpangan (IGin) dan

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

pengujian hubungan PDRB per kapita yang tidak linear. Sementara itu, dimensi ketenagakerjan (IGem) berdasarkan pada hukum Okun/*Okun's Law* (1962) yaitu hubungan negatif antara pertumbuhan output dan pengangguran.

Pendekatan Pertumbuhan yang Berpihak kepada Kelompok Miskin (*Pro-Poor Growth*)

Konsep ini muncul sebagai respons terhadap asumsi *trickle-down* bahwa kemiskinan menurun otomatis bersama pertumbuhan. Definisi relatif menurut Kakwani dan Pernia (2000) menekankan bahwa pendapatan masyarakat miskin meningkat lebih cepat dibandingkan kelompok lainnya. Sebaliknya, pendekatan absolut Ravallion dan Chen (2003) menitikberatkan pada penurunan kemiskinan. Ravallion (2004) mengingatkan bahwa definisi relatif dapat mengabaikan pertumbuhan pesat yang tetap menurunkan kemiskinan secara substansial. Kakwani dan Son (2008) menghubungkan kedua perspektif melalui *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR), yang turut digunakan dalam penelitian Afriliana & Wahyudi (2022). Studi ini memilih pendekatan absolut melalui elastisitas karena lebih sederhana dan dapat diterapkan ulang pada panel provinsi.

Konsep Pertumbuhan Inklusif

Cakupan pertumbuhan inklusif lebih luas daripada *pro-poor growth* karena memperhatikan seluruh kelompok penduduk serta menilai proses dan hasil pembangunan (Klasen, 2010). Ali dan Zhuang (2007) mengemukakan dua landasan yang saling melengkapi, yaitu pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan untuk membuka peluang dan inklusi sosial untuk memperluas akses yang setara. Ianchovichina dan Lundstrom (2009) menempatkan partisipasi angkatan kerja, termasuk pekerja informal, sebagai unsur penting dalam kontributor dan penerima manfaat. Karena itu, pengukuran dapat berfokus pada hasil maupun kesempatan, antara lain melalui indeks gabungan (Ali & Son, 2007; Sitorus & Arsani, 2018). Sebagai contoh, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Bappenas (2023) yang menggunakan 21 indikator.

Rancangan Konseptual dan Rumusan Hipotesis

Kerangka penelitian terdiri atas dua model. Model I mengukur inklusivitas pertumbuhan di tiap provinsi melalui tiga dimensi hasil: kemiskinan (IGp), ketimpangan (IGin), dan ketenagakerjaan (IGem), yang diringkas dalam indeks komposit (IGI). Model II menjelaskan variasi IGI dengan tiga determinan yang tersedia konsisten untuk seluruh provinsi, yaitu PDRB per kapita, pendidikan, dan inflasi. Hipotesis penelitian disusun berdasarkan teori yang telah diuraikan.

Tabel 1. Perumusan Hipotesis Penelitian Berdasarkan Variabel Determinan Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi dan Landasan Teoretis

Hipotesis	Variabel (t−1)	Arah pengaruh terhadap IGI	Landasan
H1	PDRB per kapita (ln)	Nonlinear: kurva-U terbalik	Kuznets (1955)
H2	Rata-rata lama sekolah	Positif	Romer (1986); Lucas (1988); Klasen (2010)
H3	Inflasi	Negatif	Daya beli kelompok miskin

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Kuznets (1955), Romer (1986), Lucas (1988), Klasen (2010), dan pendekatan daya beli masyarakat miskin

Investasi, belanja pemerintah, struktur industri, dan status provinsi pemekaran tidak dimasukkan dalam Model II karena data provinsi 2015–2025 yang konsisten tidak tersedia atau tidak teridentifikasi. Penjelasan mengenai perbedaan inklusivitas antarprovinsi diperoleh dari pengujian H1–H3 dan pembandingan karakteristik kelompok provinsi dengan IGI tertinggi serta terendah.

METODE PENELITIAN

Sumber Data dan Pengukuran Variabel

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder berbentuk panel 38 provinsi untuk tahun 2015–2025. Susunan panel tidak seimbang karena statistik kemiskinan dan Gini Ratio bagi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya baru tersedia mulai Maret 2024. Akibatnya, masing-masing provinsi baru menyumbang satu hingga dua observasi. Data seluruhnya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2026c). Model I mencakup 343 observasi provinsi-tahun, sedangkan Model II menggunakan 274 observasi dari 37 provinsi.

Tabel 2. Definisi Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Pengukuran	Sumber
Inklusivitas kemiskinan	*IGp*	Elastisitas penurunan persentase penduduk miskin (Maret) terhadap pertumbuhan PDRB	BPS
Inklusivitas ketimpangan	*IGin*	Elastisitas penurunan Gini Ratio (Maret) terhadap pertumbuhan PDRB	BPS
Inklusivitas ketenagakerjaan	*IGem*	Elastisitas penurunan TPT (Februari) terhadap pertumbuhan PDRB	BPS
Indeks inklusivitas komposit	*IGI*	Rata-rata ternormalisasi IGp, IGin, IGem (0–1)	Dihitung

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Pertumbuhan ekonomi	*g*	Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	BPS
PDRB per kapita	*lnY*	Logaritma PDRB per kapita ADHK 2010 (juta rupiah), dipusatkan pada rata-rata	BPS
Pendidikan	*RLS*	Rata-rata lama sekolah, metode baru (tahun)	BPS
Inflasi	*INF*	Inflasi tahunan (%), gabungan 12 inflasi bulanan IHK, rata-rata kota inflasi per provinsi	BPS

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015–2025, diolah penulis (2026).

Angka inflasi provinsi diperoleh dengan menggabungkan data inflasi bulanan IHK pada kota-kota pengamatan dan menghitung rata-ratanya untuk setiap provinsi. Hasil penghitungan tersebut selaras dengan angka inflasi tahunan resmi BPS, dengan selisih paling besar 0,03 poin persentase.

Model I: Pengukuran Inklusivitas

Pada setiap provinsi (i) dan tahun (t), tingkat inklusivitas dinyatakan sebagai elastisitas perubahan indikator kesejahteraan terhadap laju pertumbuhan PDRB (g). Perubahan kemiskinan dan Gini Ratio dibandingkan antara Maret tahun t dan Maret tahun t+1, sedangkan perubahan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dibandingkan antara Februari tahun t dan Februari tahun t+1. Penyelarasan ini mengaitkan perubahan indikator dengan pertumbuhan pada tahun t. Tanda negatif dalam rumus membuat nilai yang lebih besar menunjukkan hasil lebih inklusif; elastisitas negatif berarti indikator justru memburuk ketika perekonomian tumbuh.

$$IG_{it}^{p} = -\frac{\%\Delta P_{it}}{g_{it}}, \qquad IG_{it}^{in} = -\frac{\%\Delta Gini_{it}}{g_{it}}, \qquad IG_{it}^{em} = -\frac{\%\Delta TPT_{it}}{g_{it}}$$

Keterangan:
IG_{it}^{p}= Indeks Pertumbuhan Inklusif Kemiskinan
$\%\Delta P_{it}$ = Persentase Perubahan Kemiskinan Dari Tahun Sebelumnya
g_{it} = Laju Pertumbuhan PDRB (%)
IG_{it}^{in} = Indeks Pertumbuhan Inklusif Ketimpangan
$\%\Delta Gini_{it}$ = Persentase Perubahan Ketimpangan Dari Tahun Sebelumnya
IG_{it}^{em} = Indeks Pertumbuhan Inklusif Pengangguran
$\%\Delta TPT_{it}$ = Persentase Perubahan Pengangguran Dari Tahun Sebelumnya

Perhitungan elastisitas hanya dapat dilakukan pada observasi dengan $g > 0$ karena nilainya tidak terdefinisi apabila $g \leq 0$. Oleh karena itu, tahun 2020 hanya menyisakan tiga provinsi dan tidak dianalisis sebagai periode tersendiri. Untuk membatasi pengaruh pencilan, nilai pada kedua ekor distribusi diwinsorisasi pada persentil 1 dan 99. Selanjutnya, ketiga indikator diubah ke skala min–maks dan digabungkan dengan bobot yang sama berdasarkan prinsip indeks komposit Sitorus dan Arsani (2018), sehingga skor lebih tinggi menandakan inklusivitas lebih baik.

$$IGI_{it} = \frac{1}{3}\left(Z_{it}^{p} + Z_{it}^{in} + Z_{it}^{em}\right), \qquad Z_{it} = \frac{IG_{it} - IG_{min}}{IG_{max} - IG_{min}}$$

Keterangan:
IGI_{it} = Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif Wilayah i pada Tahun t
1/3 = Bobot Rata-Rata dari Ketiga Dimensi
Z_{it}^{p} = Nilai IG^{p} (Dimensi Kemiskinan) yang Sudah Dinormalisasi
Z_{it}^{in} = Nilai IG^{in} (Dimensi Ketimpangan\/Gini) yang Sudah Dinormalisasi
Z_{it}^{em} = Nilai IG^{em} (Dimensi Pengangguran\/TPT) yang Sudah Dinormalisasi
Z_{it} = Nilai Indeks Dimensi yang Sudah Dinormalisasi, dengan Rentang 0 Sampai 1
IG_{it} = Nilai Elastisitas Pertumbuhan Inklusif Wilayah i Tahun t,dari Rumus Sebelumnya
IG_{min} = Nilai IG Terendah
IG_{max} = Nilai IG Tertinggi

Ketiga IG punya skala dan sebaran yang berbeda, dan nilainya bisa negatif atau ekstrem. Normalisasi menyamakan skalanya ke 0–1 agar ketiganya bisa dijumlahkan dan dirata-ratakan secara adil.
Interpretasi IGI (0–1):
Mendekati 1 : Pertumbuhan Paling Inklusif Dibanding Wilayah atau Periode Lain.
Mendekati 0 : Pertumbuhan Paling Tidak Inklusif.

Urutan provinsi ditentukan dari rata-rata IGI. Pemeringkatan utama dibatasi pada 34 provinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya delapan observasi tahunan, sedangkan empat provinsi hasil pemekaran disajikan secara terpisah sebagai gambaran awal.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Model II: Pengujian Determinan Inklusivitas

Untuk mengurangi persoalan simultanitas, seluruh variabel penjelas menggunakan lag satu tahun. Pertumbuhan (g) tidak dimasukkan sebagai regressor karena telah menjadi penyebut dalam penghitungan IGI. Ketiadaan rangkaian data yang konsisten menyebabkan investasi, belanja pemerintah, dan komposisi industri belum dapat dianalisis. Status pemekaran juga tidak diestimasi: hanya tiga observasi provinsi baru masuk Model II, dan pengaruhnya tidak dapat diidentifikasi dalam *fixed effect*.

$$IGI_{it} = \alpha + \beta_1 \ln Y_{i,t-1} + \beta_2 \left(\ln Y_{i,t-1}\right)^2 + \beta_3 RLS_{i,t-1} + \beta_4 INF_{i,t-1} + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

Estimasi dilakukan menggunakan *pooled OLS*; penggabungan seluruh data, *fixed effect* (FE); setiap provinsi punya karakteristik tetap sendiri yang dikendalikan, misalnya kondisi geografi atau budaya, dan *random effect* (RE); perbedaan antarprovinsi dianggap acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas. Pemilihan spesifikasi didasarkan pada uji Chow, Breusch–Pagan LM, serta Mundlak. Galat baku dikelompokkan berdasarkan provinsi, sedangkan efek tahun (λ) digunakan untuk mengendalikan guncangan yang dialami bersama, termasuk pandemi. Pemeriksaan ketahanan (*robustness checks*) mencakup penggunaan IGp, IGin, dan IGem secara terpisah; indeks alternatif berbasis perubahan langsung tanpa dibagi pertumbuhan (IGR); pengeluaran periode tahun 2020–2022; pengeluaran empat provinsi baru dari sample; dan penghapusan komponen kuadrat PDRB per kapita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Statistik Deskriptif

Dalam sebagian besar tahun pengamatan, jumlah observasi berada pada kisaran 32–38 provinsi. Pengecualian terjadi pada 2020 ketika hanya tiga provinsi memenuhi syarat, mengingat mayoritas daerah mengalami kontraksi dan elastisitas tidak dapat dihitung.

Tabel 3. Ringkasan statistik deskriptif

Variabel	N	Rata-rata	SD	Min	Maks
IGp (winsorisasi)	343	0,69	0,97	−2,97	3,64
IGin (winsorisasi)	343	0,27	0,75	−1,68	3,35
IGem (winsorisasi)	343	0,42	3,04	−13,43	8,05
IGI	343	0,53	0,09	0,13	1,00
Pertumbuhan PDRB (%)	343	5,51	3,12	0,09	34,17
Perubahan kemiskinan (%)	343	−3,26	4,80	−33,69	30,55
Perubahan Gini Ratio (%)	343	−1,25	3,45	−15,23	11,60
Perubahan TPT (%)	343	−1,88	15,29	−49,87	85,27
PDRB per kapita (juta Rp, t−1)	278	43,71	32,82	9,10	201,33
Rata-rata lama sekolah (tahun, t−1)	307	8,55	1,01	4,21	11,49
Inflasi (%, t−1)	310	3,04	1,52	−0,82	7,72

Sumber: diolah penulis (2026)

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif variabel penelitian. Jumlah observasi untuk variabel utama mencapai 343 provinsi-tahun. Variabel penjelas memiliki jumlah observasi yang lebih sedikit, yaitu 278 untuk PDRB per kapita, 307 untuk rata-rata lama sekolah, dan 310 untuk inflasi. Hal ini terjadi karena penggunaan lag satu tahun dan keterbatasan ketersediaan data, terutama pada provinsi hasil pemekaran.

Selama periode pengamatan, pertumbuhan PDRB provinsi rata-rata sebesar 5,51 persen per tahun dengan simpangan baku 3,12. Rentangnya cukup lebar, dari 0,09 hingga 34,17 persen, yang menunjukkan adanya perbedaan dinamika ekonomi yang besar antarprovinsi. Pada saat yang sama, indikator sosial secara rata-rata membaik. Tingkat kemiskinan turun rata-rata 3,26 persen per tahun, rasio Gini turun 1,25 persen, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun 1,88 persen. Meski demikian, perubahan TPT memiliki variasi paling tinggi (simpangan baku 15,29), dengan rentang dari −49,87 hingga 85,27 persen. Artinya, kondisi pasar tenaga kerja antarprovinsi dan antarwaktu sangat fluktuatif.

Ketiga komponen elastisitas pertumbuhan inklusif memiliki rata-rata positif. Ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi disertai penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Dimensi kemiskinan (IG^{p}) memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 0,69. Artinya, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi rata-rata disertai penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,69 persen. Dimensi pengangguran (IG^{em}) memiliki rata-rata 0,42, dan dimensi ketimpangan (IG^{in}) memiliki rata-rata terendah, yaitu 0,27. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih efektif menurunkan kemiskinan dibanding mengurangi ketimpangan. Di antara ketiganya, IG^{em} memiliki sebaran paling besar (simpangan baku 3,04; rentang −13,43 hingga 8,05), sehingga respons pengangguran terhadap pertumbuhan paling tidak seragam antarprovinsi. Nilai

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

minimum yang negatif pada ketiga komponen juga menunjukkan bahwa pada sebagian observasi, pertumbuhan ekonomi justru diiringi memburuknya indikator sosial.

Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI) memiliki rata-rata 0,53 dengan simpangan baku 0,09, serta rentang 0,13 hingga 1,00. Rata-rata yang berada di sekitar titik tengah skala menunjukkan bahwa tingkat inklusivitas pertumbuhan provinsi di Indonesia tergolong moderat. Simpangan baku yang relatif kecil menunjukkan sebagian besar observasi terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, walaupun masih terdapat beberapa observasi dengan inklusivitas yang sangat rendah.

Dari sisi variabel penjelas, PDRB per kapita rata-rata sebesar Rp43,71 juta. Kesenjangannya sangat lebar, dari Rp9,10 juta hingga Rp201,33 juta, atau lebih dari 22 kali lipat. Rata-rata lama sekolah sebesar 8,55 tahun, dengan rentang 4,21 hingga 11,49 tahun. Hal ini mencerminkan ketimpangan capaian pendidikan antarprovinsi. Adapun inflasi rata-rata sebesar 3,04 persen, dengan rentang −0,82 persen (deflasi) hingga 7,72 persen.

Tingkat Inklusivitas dan Peringkat Provinsi

Berdasarkan 34 provinsi dengan rangkaian data memadai, IGI rata-rata mencapai 0,530 dengan simpangan baku 0,031. Skor tertinggi diperoleh Riau (0,618), kemudian Nusa Tenggara Barat (0,589) dan Aceh (0,569). Di sisi lain, Papua (0,459) serta Maluku Utara (0,467) berada di posisi terendah, diikuti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat yang sama-sama mencatat 0,497. Secara keseluruhan, variasi antarprovinsi relatif terbatas dan hanya menyumbang 11,6% dari total variasi IGI.

Tabel 4. Lima provinsi dengan IGI tertinggi dan terendah (34 provinsi; berdasarkan rata-rata IGI)

Kelompok	Peringkat	Provinsi	n	IG^{p}	IG^{in}	IG^{em}	IGI
Paling inklusif	1	Riau	10	1,36	0,74	1,97	0,618
Paling inklusif	2	NTB	9	1,49	0,16	2,17	0,589
Paling inklusif	3	Aceh	9	0,84	0,58	1,20	0,569
Paling inklusif	4	Sumatera Selatan	10	0,86	0,44	1,25	0,562
Paling inklusif	5	Sumatera Utara	10	0,94	0,38	1,07	0,559
Paling kurang inklusif	30	DKI Jakarta	10	0,24	−0,03	1,39	0,501
Paling kurang inklusif	31	Sulawesi Barat	10	0,41	0,29	−0,78	0,497
Paling kurang inklusif	32	Sulawesi Tengah	11	0,27	0,26	−0,25	0,497
Paling kurang inklusif	33	Maluku Utara	11	0,10	−0,08	−0,20	0,467
Paling kurang inklusif	34	Papua	10	0,21	0,12	−1,87	0,459

Sumber: diolah penulis (2026)

Penyebab rendahnya skor pada kelompok terbawah tidak seragam. Papua dan Sulawesi Barat terutama tertinggal pada dimensi ketenagakerjaan, masing-masing dengan IG^{em} −1,87 dan −0,78. Maluku Utara menunjukkan kelemahan pada ketimpangan (IG^{in} −0,08) dan pekerjaan (IG^{em} −0,20), sedangkan DKI Jakarta pada ketimpangan (IG^{in} −0,03). Nilai rata-rata IGI untuk kelompok provinsi Jawa dan luar Jawa identik, yaitu 0,529. Seluruh peringkat disajikan dalam Lampiran 1.

Karena hanya memiliki satu atau dua observasi, empat provinsi pemekaran tidak dimasukkan dalam peringkat utama. Skor indikatif masing-masing adalah Papua Pegunungan 0,620 (n = 2), Papua Tengah 0,543 (n = 1), Papua Barat Daya 0,469 (n = 2), serta Papua Selatan 0,432 (n = 2). Di antara provinsi tersebut, hanya Papua Selatan yang mencatat IG^{p} negatif, yaitu −0,40.

Keterkaitan Pertumbuhan dengan Perbaikan Kesejahteraan

Dari 343 observasi, penurunan kemiskinan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan pada 84,3%, penurunan ketimpangan pada 68,5%, dan penurunan pengangguran pada 72,3%. Akan tetapi, hanya 43,1% observasi memperlihatkan perbaikan ketiganya sekaligus. Ketimpangan merupakan indikator yang paling sering tidak membaik, yakni 108 observasi, disusul pengangguran sebanyak 95 dan kemiskinan sebanyak 54 observasi.

Tabel 5. Proporsi observasi dengan elastisitas positif ketika perekonomian tumbuh

Kelompok observasi	n	Kemiskinan turun (%)	Ketimpangan turun (%)	Pengangguran turun (%)	Ketiganya (%)
Seluruh sampel	343	84,3	68,5	72,3	43,1
Provinsi di Jawa	60	85,0	66,7	81,7	55,0
Provinsi luar Jawa	276	84,1	69,2	71,7	41,3
Provinsi pemekaran Papua	7	85,7	57,1	14,3	14,3
2015–2019	165	83,6	65,5	62,4	32,7
2021–2025	175	86,3	71,4	82,9	53,7

Sumber: diolah penulis (2026)

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Perubahan kondisi ketenagakerjaan merupakan sumber perbedaan yang paling nyata. Pengangguran membaik pada 81,7% observasi di Jawa dan 71,7% di luar Jawa. Secara waktu, proporsi perbaikan pengangguran meningkat dari 62,4% pada 2015–2019 menjadi 82,9% pada 2021–2025, diikuti kenaikan proporsi perbaikan ketiga indikator secara bersamaan dari 32,7% menjadi 53,7%. Hubungan antardimensi tetap lemah: korelasi IG^{p}–IG^{in} sebesar 0,18, IG^{p}–IG^{em} 0,15, dan IG^{in}–IG^{em} −0,07. Artinya, keberhasilan mengurangi kemiskinan tidak selalu berjalan seiring dengan perbaikan distribusi pendapatan dan pasar kerja.

Hasil Estimasi Determinan Inklusivitas

Hasil pengujian lebih mendukung spesifikasi *pooled*. Uji LM tidak menolak model gabungan (p = 0,376), sedangkan Mundlak tidak menemukan hubungan antara efek provinsi dan regressor (p = 0,338). Varians efek antarprovinsi pada RE bernilai nol, sehingga hasil RE sama dengan *pooled* OLS. Uji Chow baru menolak model gabungan pada taraf 10% (F = 1,42; p = 0,068); karena itu FE tetap ditampilkan sebagai pembanding. Nilai VIF tertinggi sebesar 1,62.

Tabel 6. Estimasi regresi pada Model II

Variabel (t−1)	IGI *Pooled* OLS	IGI *Fixed effect*	IG^{p} *Pooled*	IG^{in} *Pooled*	IG^{em} *Pooled*
ln PDRB per kapita	−0,021* (0,012)	0,003 (0,039)	−0,116 (0,134)	−0,171*(0,091)	−0,271 (0,261)
ln PDRB per kapita²	0,014 (0,013)	0,016 (0,031)	0,107 (0,129)	0,068 (0,117)	0,285 (0,212)
Rata-rata lama sekolah	−0,003 (0,008)	0,023** (0,011)	−0,078 (0,081)	−0,039 (0,064)	0,242 (0,184)
Inflasi	0,017** (0,007)	0,011 (0,007)	0,120* (0,070)	0,082 (0,056)	0,364** (0,142)
Efek tahun	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Observasi / provinsi	274 / 37	274 / 37	274 / 37	274 / 37	274 / 37
R^2 (FE: within)	0,260	0,253	0,198	0,124	0,195

*Catatan: galat baku cluster per provinsi dalam kurung; ***, **, * menunjukkan signifikansi 1%, 5%, 10%. Efek tahun relatif terhadap 2017; efek 2019 (−0,065), 2021 (+0,085), dan 2025 (+0,059) signifikan.*

Di antara variabel yang diuji, inflasi memperlihatkan asosiasi paling konsisten dengan IGI, tetapi arahnya positif dan tidak sesuai dugaan H3 (0,017; p < 0,05). Inflasi juga berhubungan positif dengan IG^{em} (0,364) dan IG^{p} (0,120; p < 0,10). Pengujian bersama PDRB per kapita beserta kuadratnya tidak signifikan (χ^2 = 3,22; p = 0,200), sehingga H1 belum mendapat dukungan. Pendidikan tidak signifikan pada *pooled* OLS, namun pada FE menunjukkan koefisien positif 0,023 (p < 0,05), sehingga H2 hanya didukung oleh perubahan dalam provinsi. Nilai R^2 sebesar 0,26 terutama berkaitan dengan efek tahun.

Tabel 7. Pengujian ketahanan hasil estimasi IGI

Spesifikasi	n	ln PDRB/kapita	ln PDRB/kapita²	RLS	Inflasi	RLS (FE)
Model utama	274	−0,021* (0,012)	0,014 (0,013)	−0,003 (0,008)	0,017** (0,007)	0,023** (0,011)
Tanpa 2020–2022	205	−0,020 (0,016)	0,014 (0,015)	−0,007 (0,010)	0,017** (0,007)	0,034*** (0,011)
Tanpa 4 provinsi pemekaran	271	−0,016 (0,011)	0,003 (0,011)	0,003 (0,008)	0,013** (0,006)	0,023** (0,011)
Tanpa suku kuadrat	274	−0,016 (0,011)	–	−0,001 (0,008)	0,017** (0,007)	0,022* (0,011)
Indeks laju perubahan (IGR)	274	−0,071 (0,065)	−0,007 (0,066)	0,015 (0,049)	0,103** (0,048)	0,079 (0,078)

Pada seluruh lima spesifikasi pooled, koefisien inflasi tetap positif dan signifikan. PDRB per kapita tidak mencapai signifikansi 5% pada satu pun spesifikasi. Sementara itu, koefisien pendidikan dalam FE selalu positif dan signifikan pada taraf paling tidak 10% dalam empat dari lima pengujian.

Pembahasan

Temuan utama menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan lebih sering menyertai pertumbuhan dibandingkan perbaikan ketimpangan dan ketenagakerjaan. Dari seluruh observasi, kemiskinan membaik pada 84,3%, ketimpangan pada 68,5%, dan pengangguran pada 72,3%, sedangkan perbaikan serentak hanya mencapai 43,1%. Hasil ini mendukung argumentasi Todaro dan Smith (2015) bahwa pertumbuhan saja belum cukup, serta temuan Sitorus dan Arsani (2018) mengenai tidak otomatisnya pemerataan manfaat. Walaupun kemiskinan menurun secara absolut (Ravallion & Chen, 2003), capaian distribusi dan kesempatan kerja belum selalu mengikuti, sehingga ukuran multidimensi tetap diperlukan (Klasen, 2010). Kenaikan perbaikan serentak dari 32,7% menjadi 53,7% pada 2021–2025 terutama berhubungan dengan meningkatnya proporsi penurunan pengangguran dari 62,4% menjadi 82,9%; sebagian perubahan ini mungkin terkait pemulihan pascapandemi.

Laju pertumbuhan yang tinggi ternyata tidak identik dengan manfaat pembangunan yang lebih merata. Maluku Utara dan Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan rata-rata 13,5% dan 11,3%, tetapi IGI masing-

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

masing hanya 0,467 dan 0,497. Sejak 2021, pertumbuhan Maluku Utara berada pada kisaran 14% hingga 34%. Korelasi peringkat antara pertumbuhan rata-rata dan IGI di 34 provinsi bernilai −0,53 (p = 0,001). Namun, karena pertumbuhan merupakan penyebut elastisitas, hubungan tersebut sebagian bersifat mekanis. Temuan ini hanya menunjukkan bahwa percepatan output tidak diimbangi penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran secara proporsional. Polanya sejalan dengan karakter pertumbuhan sektor komoditas yang padat modal (Ianchovichina & Lundstrom, 2009), meskipun struktur sektor tidak diuji secara langsung. Di DKI Jakarta, wilayah dengan PDRB per kapita tertinggi (Rp211,95 juta pada 2025), IG^{in} justru negatif (−0,03), menandakan ketimpangan tidak menurun saat ekonomi berkembang.

Daya jelas tiga determinan dalam model masih terbatas. H1 belum didukung karena PDRB per kapita dan suku kuadratnya tidak signifikan secara bersama (p = 0,200). Hasil ini tidak serta-merta menggugurkan Kuznets, sebab IGI mencerminkan respons kesejahteraan terhadap pertumbuhan, bukan level ketimpangan. H2 memperoleh dukungan terbatas dari FE: kenaikan rata-rata lama sekolah dalam provinsi berasosiasi dengan peningkatan IGI sebesar 0,023, konsisten dengan peran modal manusia menurut Lucas (1988). Akan tetapi, perbedaan pendidikan lintas provinsi tidak menerangkan variasi IGI. H3 juga tidak didukung karena inflasi berkorelasi positif dengan IGI. Salah satu kemungkinan yang belum diuji adalah kenaikan harga bersamaan dengan peningkatan pendapatan nominal di daerah dan periode yang dipengaruhi komoditas. Hubungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti sebab-akibat.

Perbedaan tingkat inklusivitas lebih banyak berkaitan dengan dinamika waktu daripada karakter tetap antarprovinsi. Hanya 11,6% variasi IGI berasal dari perbedaan antarwilayah, sedangkan efek bersama pada 2019, 2021, dan 2025 signifikan. Hampir seluruh provinsi menunjukkan IG^{p} positif, yakni 37 dari 38, sehingga variasi terutama muncul pada ketimpangan dan pekerjaan. Peran investasi, belanja pemerintah, serta struktur industri masih merupakan kemungkinan penjelasan yang belum dapat diuji dengan data penelitian ini.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, Model II hanya menguji tiga determinan karena seri data investasi, pengeluaran pemerintah, dan struktur industri belum konsisten antarprovinsi. Kedua, IGI menilai hasil pembangunan tanpa memasukkan kesempatan seperti kesehatan dan infrastruktur (Klasen, 2010). Ketiga, elastisitas tidak terdefinisi pada pertumbuhan nonpositif dan sangat peka ketika pertumbuhan mendekati nol, sehingga tahun 2020 hampir seluruhnya tidak tercakup. Keempat, empat provinsi baru hanya menyumbang satu hingga dua observasi. Kelima, estimasi mengidentifikasi asosiasi dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kausalitas.

KESIMPULAN

Secara umum, pertumbuhan di 38 provinsi selama 2015–2025 belum sepenuhnya inklusif. Penurunan kemiskinan menyertai 84,3% observasi pertumbuhan, tetapi penurunan ketimpangan dan pengangguran masing-masing hanya 68,5% dan 72,3%; perbaikan ketiganya secara simultan terjadi pada 43,1%. Dari 34 provinsi yang dapat diperingkat, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh memperoleh nilai tertinggi, sementara Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat berada pada kelompok terendah. Perbedaan antarprovinsi relatif kecil dan empat provinsi baru di Papua belum layak diperingkat karena rentang datanya pendek. Dalam pengujian determinan, inflasi menunjukkan hubungan positif dengan IGI, pendidikan hanya positif pada variasi dalam provinsi, dan PDRB per kapita tidak signifikan.

Rekomendasi kebijakan: (1) Penilaian kinerja pembangunan daerah sebaiknya mempertimbangkan perubahan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang menyertai pertumbuhan, bukan semata-mata besarnya laju PDRB. Perhatian khusus diperlukan pada ketimpangan dan kesempatan kerja karena kedua dimensi tersebut paling sering tidak mengalami perbaikan. (2) Wilayah dengan ekspansi ekonomi cepat tetapi nilai IGI rendah, khususnya Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, perlu menghubungkan perkembangan sektor komoditas dengan penciptaan peluang kerja bagi penduduk setempat. (3) Upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah dalam setiap provinsi perlu diteruskan karena indikator tersebut berkaitan positif dengan peningkatan inklusivitas pada analisis perubahan internal provinsi. (4) Penelitian berikutnya dapat memperluas model dengan investasi, pengeluaran pemerintah, dan struktur industri ketika data provinsi telah memadai. Pengukuran juga dapat memasukkan dimensi kesempatan, terutama kesehatan dan infrastruktur. Setelah data wilayah pemekaran memiliki rentang waktu lebih panjang, pendekatan sistem GMM atau variabel instrumen dapat dilakukan.

Lampiran 1. Urutan Provinsi Berdasarkan Indeks Inklusivitas

Pemeringkatan dihitung menggunakan rata-rata IGI pada 34 provinsi dengan setidaknya delapan observasi tahunan (n menunjukkan jumlah tahun). Angka empat provinsi hasil pemekaran disajikan hanya sebagai indikasi awal.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Table 8. Urutan Provinsi Berdasarkan Indeks Inklusivitas

Peringkat	Provinsi	n	IG^{p}	IG^{in}	IG^{em}	IGI
1	Riau	10	1,36	0,74	1,97	0,618
2	Nusa Tenggara Barat	9	1,49	0,16	2,17	0,589
3	Aceh	9	0,84	0,58	1,20	0,569
4	Sumatera Selatan	10	0,86	0,44	1,25	0,562
5	Sumatera Utara	10	0,94	0,38	1,07	0,559
6	Lampung	10	1,03	0,52	−0,15	0,554
7	Kalimantan Selatan	10	0,90	0,36	0,87	0,552
8	Sumatera Barat	10	0,87	0,38	0,75	0,550
9	Bali	9	0,97	0,16	1,31	0,549
10	Kalimantan Timur	8	0,70	0,25	1,46	0,544
11	Jawa Tengah	10	0,85	0,18	1,05	0,541
12	Jawa Timur	10	0,70	0,28	1,08	0,540
13	DI Yogyakarta	10	0,87	0,12	0,91	0,536
14	Banten	10	0,39	0,48	0,74	0,533
15	Maluku	10	0,62	0,36	0,29	0,530
16	Bengkulu	10	0,91	0,14	0,24	0,528
17	Kep. Riau	10	0,71	0,06	1,19	0,528
18	Sulawesi Utara	10	0,60	0,09	1,20	0,525
19	Jawa Barat	10	0,79	0,04	0,75	0,523
20	Kep. Bangka Belitung	10	0,35	0,69	−0,64	0,523
21	Nusa Tenggara Timur	10	0,64	0,20	0,46	0,523
22	Sulawesi Tenggara	10	0,52	0,21	0,70	0,521
23	Gorontalo	10	0,82	0,12	0,07	0,520
24	Jambi	10	0,77	0,38	−0,90	0,520
25	Kalimantan Barat	10	0,65	0,11	0,56	0,518
26	Sulawesi Selatan	10	0,49	0,27	0,30	0,517
27	Kalimantan Utara	10	0,55	0,28	−0,04	0,515
28	Kalimantan Tengah	10	0,31	0,32	0,30	0,511
29	Papua Barat	9	0,80	0,18	−0,76	0,510
30	DKI Jakarta	10	0,24	−0,03	1,39	0,501
31	Sulawesi Barat	10	0,41	0,29	−0,78	0,497
32	Sulawesi Tengah	11	0,27	0,26	−0,25	0,497
33	Maluku Utara	11	0,10	−0,08	−0,20	0,467
34	Papua	10	0,21	0,12	−1,87	0,459
–	Papua Pegunungan (pemekaran)	2	2,58	1,40	−4,62	0,620
–	Papua Tengah (pemekaran)	1	0,66	2,89	−9,76	0,543
–	Papua Barat Daya (pemekaran)	2	1,15	−0,65	−0,99	0,469
–	Papua Selatan (pemekaran)	2	−0,40	0,06	−1,36	0,432

REFERENSI

Aghion, P., & Howitt, P. (1998). Endogenous growth theory. MIT Press.

Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring inclusive growth. Asian Development Review, 24(1), 11–31. https://doi.org/10.1142/S0116110507000024

Ali, I., & Zhuang, J. (2007). Inclusive growth toward a prosperous Asia: Policy implications (ADB Economics Working Paper No. 97). Asian Development Bank.

Afriliana, S. N., & Wahyudi, S. T. (2022). Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif: Studi komparasi antarprovinsi di Indonesia. Journal of Development Economic and Social Studies, 1(1). https://doi.org/10.21776/jdess.2022.01.1.5

Badan Pusat Statistik. (2026a). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363.

Badan Pusat Statistik. (2026b). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen [Berita Resmi Statistik, 5 Februari 2026]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html

Badan Pusat Statistik. (2026c). Query builder dan tabel statistik BPS: Persentase penduduk miskin, Gini ratio, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010, PDRB per kapita ADHK 2010, rata-rata lama sekolah (metode baru), dan inflasi kota IHK, 2015–2026. https://www.bps.go.id

Bappenas. (2023). Indeks pembangunan ekonomi inklusif. Kementerian PPN/Bappenas.

Domar, E. D. (1946). Capital expansion, rate of growth, and employment. Econometrica, 14(2), 137–147. https://doi.org/10.2307/1905364

Harrod, R. F. (1939). An essay in dynamic theory. The Economic Journal, 49(193), 14–33.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

https://doi.org/10.1111/ecoj.12224
Ianchovichina, E., & Lundstrom, S. (2009). Inclusive growth analytics: Framework and application (Policy Research Working Paper No. 4851). World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4851
Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is pro-poor growth? Asian Development Review, 18(1), 1–16. https://doi.org/10.1142/S0116110500000014
Kakwani, N., & Son, H. H. (2008). Poverty equivalent growth rate. Review of Income and Wealth, 54(4), 643–655. https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2008.00293.x
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Peresmian Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya berdasarkan UU No. 14, 15, 16 Tahun 2022 dan UU No. 29 Tahun 2022.
Klasen, S. (2010). Measuring and monitoring inclusive growth: Multiple definitions, open questions, and some constructive proposals (ADB Sustainable Development Working Paper No. 12). Asian Development Bank. https://doi.org/10.1332/policypress/9781447332497.003.0006
Kusumaningrum, S., & Yuhan, R. J. (2019). Pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan indeks komposit pertumbuhan inklusif dan faktor yang memengaruhinya. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 10(1), 1–17. https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1150
Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45(1), 1–28. https://www.jstor.org/stable/1811581
Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42. https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7
Lukiawan, R., Mulatsih, S., & Purwanto, D. A. (2026). Determinan pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 15(1), 1–16. https://doi.org/10.29244/jekp.15.1.2026.1-16
Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407–437. https://doi.org/10.2307/2118477
Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its measurement and significance. In Proceedings of the Business and Economic Statistics Section, American Statistical Association (pp. 98–104).
Perotti, R. (1996). Growth, income distribution, and democracy: What the data say. Journal of Economic Growth, 1(2), 149–187.
Persson, T., & Tabellini, G. (1994). Is inequality harmful for growth? The American Economic Review, 84(3), 600–621.
Ravallion, M. (2004). Pro-poor growth: A primer (Policy Research Working Paper No. 3242). World Bank.
Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring pro-poor growth. Economics Letters, 78(1), 93–99.
Rini, D. L., & Tambunan, T. T. H. (2021). Inclusive economic growth of Indonesia and its determinants: Recent evidence with provincial data. Asian Journal of Interdisciplinary Research. https://doi.org/10.34256/ajir2118
Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002–1037.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf.
Sitorus, A. V. Y., & Arsani, A. M. (2018). A comparative study of inter-provincial inclusive economic growth in Indonesia 2010–2015 with approach methods of ADB, WEF, and UNDP. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 2(1). https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.32
Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.
Swan, T. W. (1956). Economic growth and capital accumulation. The Economic Record, 32(2), 334–361.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Pearson.